



PENGARUH TINGKAT ESELONISASI DAN BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA TERHADAP KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Renny Sukmono
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: renny@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[06 08 2022]

Dinyatakan Diterima
[07 09 2022]

KATA KUNCI:

Penyerapan Anggaran, Penumpukan Belanja, IKPA, Uang Persediaan, Tingkat Eselonisasi, Kinerja Penganggaran

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRACT

Expenditures made by the government should be accompanied by an ideal pattern of budget absorption that is able to provide a stimulus to the economy. This study aims to examine how the quality of budget absorption and the factors that influence it. The object of research is a work unit within the Ministry of Finance within the scope of the ABC KPPN payment area in Jakarta. The sampling technique used is saturated sampling. Average Test Analysis is used to see the quality of budget absorption and dummy regression analysis is used to see the factors that affect the quality of budget absorption. Based on the results of the analysis showed that the quality of the work unit budget absorption was good (not piling up) at the end of the year. The echelonization level factor and the budget amount affect the quality of budget execution. Budgeting performance is one component that really needs commitment, attention and supervision from superiors. The farther this span of control is, the weaker the supervision will be. Work units with large categories of budget have the highest absorption rates. Awareness of potential unrealized budgets encourages work units with large budgets to realize the budget as soon as possible.

ABSTRAK

Belanja yang dilakukan pemerintah seyogyanya diiringi dengan pola penyerapan anggaran yang ideal yang mampu memberikan stimulus bagi perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kualitas penyerapan anggaran dan faktor yang mempengaruhinya. Objek penelitian adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan pada lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Analisis Uji Rata-Rata digunakan untuk melihat kualitas penyerapan anggaran dan analisis regresi dummy digunakan untuk melihat faktor yang mempengaruhi kualitas penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas penyerapan anggaran satuan kerja sudah baik (tidak menumpuk) pada akhir tahun. Faktor tingkat eselonisasi dan besaran anggaran mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran. Kinerja penganggaran merupakan salah satu komponen yang sangat membutuhkan komitmen, perhatian dan pengawasan atasan. Semakin jauh rentang kendali ini maka pengawasan akan semakin lemah. Satuan kerja dengan besaran anggaran kategori besar memiliki tingkat penyerapan paling tinggi. Kewaspadaan terhadap potensi anggaran yang tidak terealisasi mendorong satuan kerja dengan anggaran besar sebisa mungkin merealisasikan anggaran sesegera mungkin.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan tajam penarikan dana pada akhir tahun merupakan masalah yang belum bisa dihindari baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penumpukan penarikan dana pada akhir tahun menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran yang tidak optimal dan berpotensi menimbulkan kerugian negara (Zaenudinsyah, 2016). Penarikan dana pada akhir tahun rentan dengan terjadinya hal-hal yang bersifat *fraud*. Potensi *fraud* ini yang menjadi stigma negatif masyarakat dan menganggap bahwa kegiatan pemerintah pada akhir tahun sebagai kegiatan untuk menghabiskan anggaran. Satuan kerja masih melakukan mekanisme ini, meskipun sosialisasi penarikan dana sedini mungkin sering digaungkan karena adanya target penyerapan anggaran yang harus dicapai oleh satuan kerja.

Pemerintah memiliki tujuan yang baik dengan mensyaratkan penyerapan yang maksimal oleh satuan kerja yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sedianya satuan kerja dapat melakukan penarikan dana mulai dari awal tahun. Namun, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan satuan kerja mengalami keterlambatan dalam merealisasikan kegiatan sehingga penyerapan anggaran satker menjadi lambat. Pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup sesuai dengan rencana anggaran yang diajukan oleh satuan kerja. Jika anggaran dalam rekening kas umum negara tidak mencukupi, pemerintah akan mencari solusi untuk menutup kekurangan ini melalui berbagai sumber pembiayaan. Pembiayaan ini sering menimbulkan beban bagi APBN yaitu beban bunga yang harus dibayarkan. Semakin lambat penyerapan anggaran yang dilakukan satuan kerja akan semakin besar dana "nganggur", di sisi lain bunga akibat pembiayaan terus berjalan. Hal ini merupakan salah satu bukti kerugian ekonomis yang disebabkan oleh penyerapan anggaran satuan kerja yang lambat (Heryanto, 2012).

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengungkap penyebab permasalahan penumpukan pencairan dana pada akhir tahun ini. Ulfa (2017) mengungkap faktor penyebab penumpukan pencairan dana pada akhir tahun antara lain kualitas perencanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa satuan kerja. Sudarwati (2017) mengidentifikasi faktor perencanaan dan pelaksanaan anggaran, faktor PBJ dan faktor SDM sebagai faktor penghambat realisasi anggaran. Hal senada diungkap oleh Alfayuni (2021) yaitu faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran di Kota Cirebon adalah faktor perencanaan dan pelaksanaan anggaran, PBJ dan SDM. Selain keempat faktor yang diungkap sebelumnya sebagai faktor yang mempengaruhi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun, Zaenudinsyah (2016) menambahkan faktor administrasi dan faktor internal organisasi. Heryanto (2012) menambahkan satu penyebab terjadinya

keterlambatan penarikan dana adalah faktor penggantian uang persediaan. Uang persediaan adalah uang yang digunakan oleh satuan kerja untuk menjalankan kegiatan operasional kantor. Tiap-tiap satuan kerja diberikan sejumlah uang persediaan tertentu sesuai dengan besaran anggaran yang dikelola oleh satuan kerja tersebut. Semakin besar anggaran yang dikelola, maka makin besar uang persediaan yang diberikan.

Siklus penganggaran dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang krusial yang menentukan kualitas penyerapan anggaran satuan kerja. Setiap tahun anggaran, satuan kerja menyusun perencanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya. Selain besaran anggaran, satuan kerja juga menyusun rencana penarikan dana setiap bulan yang akan menjadi dasar Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran tiap bulan. Perencanaan yang tidak akurat (misalnya dengan menyusun perencanaan dengan proporsi yang sama (merata) pada setiap bulan) akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan anggaran.

Kementerian Keuangan telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki kualitas penyerapan anggaran, salah satunya adalah dengan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi. Kementerian Keuangan menggunakan skor penilaian untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Penilaian ini melihat kinerja penganggaran dari beberapa aspek yaitu aspek kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kementerian Perdagangan (2021) pada website-nya menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan dan menaikkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku sehingga elemen yang mempengaruhi IKPA akan mendapat nilai yang baik dan penyerapan anggaran akan sesuai dengan yang diharapkan. Darma (2017) menyatakan bahwa komitmen terhadap pelaksanaan anggaran semakin menurun seiring peningkatan tingkatan eselonisasi. Rentang kendali yang panjang dan kompleksitas kegiatan yang dilakukan adalah faktor penghambat monitoring oleh atasan.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penganggaran sebagian besar dilakukan pada suatu satuan kerja tertentu dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Sementara itu, pada penelitian ini mencoba untuk melihat gambaran kualitas pelaksanaan anggaran satker-satker Kementerian Keuangan dalam wilayah pembayaran

KPPN ABC di Jakarta. Pada penelitian-penelitian sebelumnya faktor yang diungkap paling banyak mempengaruhi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun adalah faktor perencanaan dan pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa dan faktor SDM. Penelitian dengan melibatkan tingkat eselonisasi dan besaran anggaran yang dikelola masih sangat jarang dilakukan. KPPN ABC dipilih untuk menjadi objek penelitian karena satker Kementerian Keuangan di wilayah KPPN ABC memiliki tingkat eselonisasi yang beragam, mulai dari satker eselon I, satker eselon II dan satker eselon III. Variasi ini menyebabkan munculnya kekhasan pengelolaan anggaran pada tiap-tiap satuan kerja.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh tingkat eselonisasi dan besaran anggaran yang dikelola terhadap kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja Kementerian Keuangan di lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah:

- Bagaimana kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Kementerian Keuangan di lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta.
- Apakah tingkat eselonisasi dan besaran anggaran yang dikelola mempengaruhi kualitas pelaksanaan satuan kerja.

1.3 Tujuan

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

- mengetahui kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Kementerian Keuangan di lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta;
- mengetahui apakah tingkat eselonisasi dan besaran anggaran yang dikelola mempengaruhi kualitas pelaksanaan satuan kerja.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sejumlah pihak akan menemukan solusi terbaik sehingga dapat mengoptimalkan kinerja penganggaran satuan kerja.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap satuan kerja Kementerian Keuangan di lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data realisasi anggaran tiap-tiap satker pada tahun 2019 yang berada pada wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta. Metode analisis yang digunakan tidak melibatkan kemungkinan adanya interaksi antar variabel bebas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anggaran

Anggaran merupakan komponen penting bagi pemerintah untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Basri, 2013). Anggaran diusulkan oleh satuan kerja terendah untuk selanjutnya ditelaah dan direviu oleh pejabat yang lebih tinggi. Anggaran merupakan cerminan suatu rencana kinerja yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan mata uang (Mulyadi, 2001). Penganggaran adalah bagian paling penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan bisa dijelaskan dari beberapa sudut pandang seperti politik, ekonomi, keuangan dan akuntansi (Abdullah, 2019). Anggaran biasanya disusun oleh satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Selain mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan selama setahun, satuan kerja juga harus menyusun *timeline* penarikan dana yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. *Timeline* ini digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan upaya sehingga posisi kas pada Rekening Kas Umum Negara mampu mencukupi semua kebutuhan pendanaan kegiatan satuan kerja. Empat tujuan utama penyusunan anggaran menurut Robert dan Vinjay (2009) adalah:

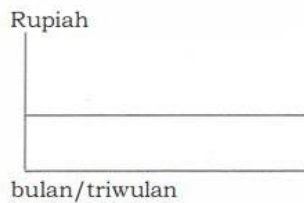
- Sebagai alat untuk melihat kesesuaian dengan rencana strategis organisasi;
- Sebagai alat bantu untuk mengoordinasikan sejumlah kegiatan dari beberapa elemen organisasi;
- Sebagai petunjuk bagi manajer target kinerja yang diharapkan organisasi dengan mengoptimalkan anggaran yang disediakan;
- Anggaran sebagai wujud komitmen manajer dan dapat digunakan untuk menilai kinerja sebenarnya seorang manajer.

Sesuai dengan PMK Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh satuan kerja yang berlaku selama satu tahun anggaran. Informasi-informasi yang tertuang dalam DIPA digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi Kementerian Keuangan/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Besaran anggaran (PAGU) dalam DIPA merupakan batas tertinggi anggaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan.

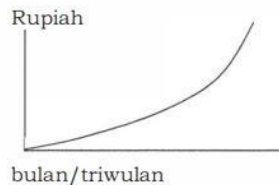
2.2. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran atau pencairan dana/anggaran merupakan definisi penyerapan anggaran (Halim, 2014). Pola penyebaran penarikan dana bulanan sesuai dengan PMK Nomor 197 tahun 2017 terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pola

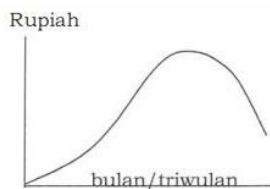
penarikan dana merata, meningkat dan ideal dengan visualisasi grafik sebagai berikut.



Gambar 1 Pola Penyebaran Merata



Gambar 2 Pola Penyebaran Meningkat



Gambar.3 Pola Penyebaran Ideal

Pola penyebaran penarikan dana merata adalah pola penarikan dana yang sama dari awal tahun hingga berakhirnya tahun anggaran. Pola ini terjadi karena jumlah pagu dalam satu tahun dibagi secara merata ke dalam dua belas bulan. Biasanya jenis penarikan dana yang merata terjadi pada pembayaran-pembayaran yang bersifat rutin seperti belanja gaji, honor, tunjangan, dan lain-lain. Pola penyebaran penarikan dana meningkat adalah pola penyebaran yang rendah pada awal tahun anggaran, kemudian seiring berjalannya waktu meningkat, dan mencapai puncaknya pada akhir tahun. Gambar 2 menunjukkan penarikan dana yang menggelembung pada akhir tahun. Rusqiyati (2014) menyatakan bahwa realisasi anggaran pemerintah mengikuti "Kurva S", yaitu secara memiliki kecenderungan stabil pada awal tahun, kemudian meningkat pada pertengahan dan kembali stabil pada akhir tahun.

Proses pencairan dana satuan kerja dapat dikategorikan cepat dan lambat. Pencairan dana dikategorikan lambat jika penarikan dana lebih kecil jika dibandingkan dengan perencanaan pada DIPA dan disebut penarikan dana kategori cepat jika lebih besar daripada perencanaan dalam DIPA (Nugroho, 2013). Penarikan dana oleh pemerintah merupakan wujud belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan belanja yang dilakukan pemerintah seyogyanya diikuti oleh pola penyerapan anggaran yang ideal sehingga APBN mampu menjalankan fungsinya sebagai stimulus perekonomian (Kementerian Keuangan, 2013).

2.3. Alur Pencairan Dana

Alur dan mekanisme dalam mencairkan dana diatur oleh PMK nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Alur dan mekanisme pencairan dana ini erat kaitannya dengan pihak yang berwenang dan dokumen administrasi yang digunakan pada setiap tahapannya. Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pejabat perbendaharaan satuan kerja. Untuk dokumen administrasi yang terkait dengan mekanisme pencairan dana ini meliputi surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D).

Pejabat pembuat komitmen (PPK) merupakan pihak yang berwenang untuk membuat dan menandatangani SPP. Penerbitan SPP harus dilengkapi dengan bukti tagih yang akan dibebankan kepada negara. Pejabat Penandatanganan SPM selanjutnya menguji kebenaran SPP sekaligus bukti pendukung yang dilampirkan. Jika SPP telah sesuai ketentuan untuk dibayarkan, PP-SPM menerbitkan SPM. Kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran menyampaikan SPM beserta dokumen kelengkapan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

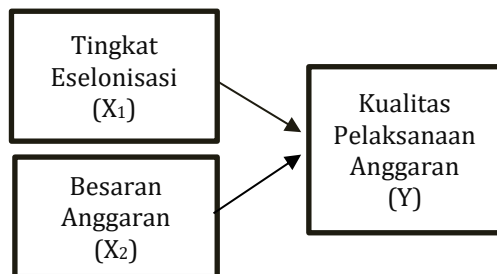
KPPN melakukan pengujian terhadap SPM yang diajukan oleh KPA terkait kebenaran tagihan, kesesuaian antara SPM dengan DIPA dan ketersediaan dana dalam DIPA. Jika semua telah sesuai dengan ketentuan, KPPN menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk memindahbukukan dari rekening pengeluaran ke rekening yang dituju yang tercantum di SPM. Jika dalam pengujian, KPPN menemukan hal yang tidak sesuai, KPPN memiliki wewenang untuk menolak dan mengembalikan SPM kepada KPA satuan kerja.

2.4. Kerangka Berpikir

Purtanto (2015) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah dengan menggunakan analisis regresi dan hasil yang didapatkan adalah komitmen manajemen dan perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil lain dari penelitian Purtanto (2015) adalah bahwa monitoring dan evaluasi berpengaruh positif namun kurang signifikan. Miliasih (2012) menyatakan permasalahan kebijakan teknis satker seperti keterlambatan penunjukan pejabat pengelola anggaran dan keterlambatan dalam penunjukan panitia PBJ adalah faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran satker kementerian/lembaga di lingkup wilayah kerja KPPN Pekanbaru. Kedua penelitian ini menunjukkan peran sentral pimpinan dalam penyerapan anggaran satker.

Permasalahan dalam tahapan proses realisasi anggaran menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran (Miliasih, 2012). Penyusunan kelengkapan dokumen pendukung surat perintah pembayaran (SPP) serta tahap pengujian dan penerbitan surat perintah

membayar (SPM) adalah contoh tahapan proses realisasi anggaran yang menghambat keterlambatan penyerapan anggaran. Besaran anggaran yang dikelola berpotensi mempengaruhi frekuensi penerbitan SPP dan SPM. Dasar pemikiran inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini. Gambar 3 menunjukkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 3 Kerangka Berpikir

Metode analisis regresi linier berganda dengan melibatkan variabel boneka adalah analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis penelitian ini adalah tingkat eselonisasi dan besaran anggaran mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari hasil rekapitulasi realisasi anggaran per bulan satker di lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC yang bersumber dari OMSPAN. Data yang digunakan adalah pagu, tingkat eselonisasi, besaran uang persediaan yang dikelola satuan kerja, dan realisasi anggaran tiap bulan satuan kerja Kementerian Keuangan di lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta pada tahun 2019.

3.2. Penentuan Jumlah Sampel dan Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan seluruh satuan kerja Kementerian Keuangan pada wilayah pembayaran KPPN ABC yaitu sebanyak 144 satker. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh artinya semua anggota sampel diambil sebagai sampel. Akan tetapi terdapat 21 satker yang tidak bisa diikutsertakan dalam analisis karena ketidaklengkapan data, sehingga total satker yang digunakan dalam analisis adalah 123 satker.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas pelaksanaan anggaran sebagai variabel dependen dan dua variabel independen yaitu tingkat eselonisasi dan besaran anggaran yang dikelola. Kualitas pelaksanaan anggaran ini dilihat dari sisi persentase realisasi anggaran satuan kerja sampai dengan triwulan III. Realisasi anggaran

sampai dengan triwulan III dapat menunjukkan apakah satuan kerja melakukan penumpukan pencairan dana pada akhir tahun atau tidak. Pertimbangan lain yaitu realisasi sampai dengan triwulan III lebih menunjukkan kinerja satuan kerja karena jika analisis menggunakan realisasi setahun akan sulit membedakan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja karena realisasi anggaran hampir sama antar satuan kerja. Sesuai dengan Indonesia *Treasury Update* Tahun 2018 dinyatakan bahwa target penyerapan ideal dan proporsional adalah mendekati proporsi 15% (Triwulan I), 20% (Triwulan II), 30% (Triwulan III) dan 35% (Triwulan IV). Dengan menggunakan patokan ini, jika realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III mampu mencapai minimal 65% dari total anggaran, hal ini mengindikasikan tidak terjadi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun.

Variabel independen yang digunakan adalah tingkat eselonisasi dan besaran anggaran yang dikelola oleh satuan kerja. Variabel penelitian ini dikembangkan sendiri oleh penulis. Tingkat eselonisasi adalah proksi yang dipilih untuk menggambarkan peran pimpinan dalam penyerapan anggaran. Tingkat eselonisasi memiliki skala data ordinal. Tingkat eselonisasi ini menunjukkan level eselonisasi satuan kerja Kementerian Keuangan yaitu eselon I, eselon II dan eselon III. Sementara itu, untuk besaran anggaran yang dikelola memiliki skala data rasio, namun untuk penelitian ini besaran anggaran yang dikelola dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu kategori anggaran besar, anggaran sedang dan anggaran kecil. Penetapan 3 kategori ini berdasarkan pengkategorian uang persediaan yang diberikan kepada satker. Besarnya anggaran yang dikelola satker menentukan besarnya uang persediaan yang diberikan. Besaran anggaran yang dikelola mempengaruhi frekuensi penerbitan SPP dan SPM. Miliasih (2012) menyatakan penerbitan SPP dan SPM mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran satker.

Tabel 1 Tabulasi Silang antara Besaran Anggaran dan Tingkat Eselonisasi

Besar Anggaran	Tingkat Eselon		
	I	II	III
Kecil	0	0	6
Sedang	0	0	11
Besar	12	19	75

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis regresi *dummy* (analisis regresi yang melibatkan variabel *dummy* atau variabel boneka) karena variabel independen yang digunakan dalam skala ordinal. Analisis regresi digunakan untuk melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelaksanaan anggaran. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah persentase realisasi anggaran (non

belanja pegawai) sampai dengan triwulan III satker. Formula yang digunakan untuk mengukur variabel dependen ini adalah:

$$Y = \frac{R_i}{P_i} \times 100\%$$

Keterangan:

R_i adalah realisasi anggaran (non belanja pegawai) s.d Triwulan III satker i .

P_i adalah pagu anggaran setahun (non belanja pegawai) satker i .

Langkah pertama yang dilakukan pada analisis regresi *dummy* adalah menentukan kode untuk variabel yang digunakan.

Tabel 2 Kode Dummy untuk Variabel Tingkat Eselonisasi

Tingkat Eselon	Kode Dummy	
	D ₁	D ₂
Eselon III	0	0
Eselon II	1	0
Eselon I	0	1

Variabel independen tingkat eselonisasi terdiri dari eselon I, eselon II dan eselon III. Karena variabel terdiri dari 3 kategori, maka variabel dummy yang dibentuk adalah 2 variabel yaitu D₁ dan D₂. Kategori Eselon III menjadi kategori dasar (kategori pembanding). Jika D₁ dan/atau D₂ signifikan, maka tingkat eselonisasi ini mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran satker. Jika D₁ signifikan, kualitas pelaksanaan anggaran satker eselon II berbeda dengan kualitas pelaksanaan anggaran eselon III dengan beda sebesar koefisien regresi.

Sama halnya dengan tingkat eselonisasi, kategori besaran anggaran dikategorikan ke dalam 3 kategori sesuai dengan besaran uang persediaan (UP) yang diberikan. Besaran UP ini ditentukan oleh besaran anggaran yang dikelola satker. Kategori dasar yang digunakan dalam pembentukan variabel dummy untuk besaran anggaran adalah satker dengan kategori besar. Jika D₃ dan/atau D₄ signifikan, maka besaran anggaran mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran satker. Jika D₃ signifikan, kualitas pelaksanaan anggaran satker pagu kecil berbeda dengan kualitas pelaksanaan anggaran satker pagu besar dengan beda sebesar koefisien regresi.

Tabel 3 Kode Dummy untuk Besaran DIPA

PAGU UP (Miliar Rp)	Kategori Besaran Anggaran	Kode Dummy	
		D ₃	D ₄
0 s.d 2,4	Kecil	0	0
>2,4 s.d 6	Sedang	1	0
>6	Besar	0	1

Persamaan regresi yang digunakan adalah $Y = \beta_0 + \beta_1 D_1 + \beta_2 D_2 + \beta_3 D_3 + \beta_4 D_4$. Langkah kedua yaitu menentukan persamaan regresi dummy dan melakukan uji kebaikan model. Tahapan selanjutnya yang tidak boleh tidak dilakukan pada analisis regresi adalah menguji apakah persamaan regresi yang

didapatkan memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan yaitu tidak terjadi multikolinieritas dan tiga asumsi terhadap residual yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi autokorelasi dan residual berdistribusi normal. Setelah semua asumsi terpenuhi, langkah selanjutnya adalah interpretasi hasil dan koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola penyebaran penarikan dana yang ideal adalah pola penyebaran penarikan dana yang kecil pada awal tahun anggaran karena masih dalam masa persiapan, kemudian mulai meningkat dan memuncak pada pertengahan tahun karena pada pertengahan tahun berbagai kegiatan dan aktivitas sudah terealisasi. Setelah melewati triwulan III, angka penarikan dana perlahan mulai turun karena memasuki tahap penyelesaian. Pola ini menggambarkan pola penarikan dana yang dapat menunjang fungsi APBN karena pola penarikan dana seperti ini, dalam skala makro, dapat menjadi *multiplier effect* dari belanja negara yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan menjadi penggerak ekonomi nasional.

Analisis data dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja Kementerian Keuangan lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta. Tahap analisis selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah tingkat eselonisasi dan besaran anggaran yang dikelola mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja.

4.1 Kualitas Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Sesuai dengan Indonesia *Treasury Update* Tahun 2018 dinyatakan suatu satuan kerja dikatakan tidak melakukan penumpukan belanja pada akhir tahun jika realisasi anggaran satuan kerja adalah lebih dari 65%.

Tabel 4 Frekuensi Satuan Kerja Kementerian Keuangan Berdasarkan Persentase Realisasi Anggaran s.d Triwulan III

Realisasi Anggaran	Frekuensi
< 65%	10
≥ 65%	113

Sebanyak 91,87% satuan kerja Kementerian Keuangan di lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC tidak menumpuk belanja pada akhir tahun. Satuan kerja yang masih mengalami kendala penyerapan anggaran dapat dikatakan sedikit. Satuan kerja Kementerian Keuangan di lingkup wilayah KPPN ABC telah melakukan penyerapan anggaran dengan mengaplikasikan pola penarikan dana yang ideal. Untuk melakukan analisis lebih detail, analisis akan dilanjutkan dengan pengujian apakah rata-rata persentase realisasi penyerapan anggaran satuan kerja sampai dengan triwulan III lebih dari 65%. Tahapan pengujian adalah sebagai berikut:

$H_0 : \mu = 65\%$

$H_1 : \mu > 65\%$

dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ didapatkan nilai rata-rata realisasi anggaran sampai dengan triwulan III adalah 74,23%, nilai t_{hitung} sebesar 13,46 dan $p-value$ sebesar 0,000 dapat diputuskan tolak H_0 dan disimpulkan bahwa rata-rata realisasi anggaran sampai dengan triwulan III lebih dari 65%.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC tidak melakukan penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Penyerapan dengan proporsi yang ideal yang dapat menjadi *multiplier effect* dari belanja negara dan dapat menggerakkan perekonomian nasional.

4.2 Pengaruh Tingkat Eselonisasi dan Besaran Anggaran terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Analisis regresi dummy digunakan untuk mengetahui apakah tingkat eselonisasi dan besaran anggaran mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran. *Dummy Regression* digunakan karena variabel yang digunakan memiliki skala data ordinal. Kualitas pelaksanaan anggaran diprosikan oleh variabel realisasi anggaran sampai dengan triwulan III. Langkah pertama analisis ini adalah dengan melakukan

pengujian pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel tak bebas dengan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : tingkat eselonisasi dan besaran anggaran yang dikelola mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran satker.

dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ didapatkan hasil anova pada Tabel 5.

Tabel 5 Anova

Sumber	df	SS	MS	F_{hitung}	$P-value$
Regresi	4	2465,64	616,41	15,85	0,000
Residual	118	4590,46	38,90		
Total	122	7056,10			

Sumber : diolah penulis

Hasil pengujian simultan berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa tingkat eselonisasi dan besaran anggaran secara simultan mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja. Berdasarkan hasil pengujian ini, analisis data dapat dilanjutkan pada tahap pengujian individu, interpretasi persamaan dan interpretasi koefisien determinasi. Namun, sebelum tahapan tersebut langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pengecekan apakah hasil persamaan regresi yang didapatkan telah memenuhi asumsi-asumsi yang dipersyaratkan.

Tabel 6 Hasil Pengecekan Asumsi Analisis Regresi

Asumsi	Pengecekan	Hasil
Multikolinieritas	Nilai VIF	Output Regresi: VIF Konstan - D1 1,0 D2 1,1 D3 2,6 D4 2,6 Tidak terdapat nilai VIF > 10. Kesimpulan: antar variabel bebas saling bebas.
Heteroscedastisitas	Uji Glejser (Regresi antara absolut residual dengan variabel bebas)	absres = 4,82 + 1,20 d1 + 0,464 d2 + 0,76 d3 - 1,91 d4 Analysis of Variance Source DF SS MS F P Regression 4 64,60 16,15 1,19 0,319 Residual 118 1601,77 13,57 Total 122 1666,37 Hasil Uji F tidak signifikan. Kesimpulan : varians residual homogen.
Autokorelasi	Uji Durbin Watson	Output Regresi : Nilai DW = 1,79323 k = 4 dan n=123 didapatkan nilai d _L =1,6392 dan d _u =1,7733. Karena d _u =1,7733 < DW=1,79323 < (4- d _u = 2,9967) Kesimpulan : residual ke n tidak dipengaruhi oleh residual ke n-1 (antar residual saling bebas).
Distribusi Normal	Uji Kolmogorov Smirnov	Hasil Uji: KS = 0,039 p-value = > 0,15 Kesimpulan : residual berdistribusi normal.

Sumber: diolah penulis

Kesimpulan pada Tabel 6 diketahui bahwa pada analisis regresi yang dilakukan tidak terjadi pelanggaran asumsi sehingga analisis dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu uji individual, interpretasi persamaan regresi dan interpretasi koefisien determinasi. Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang didapatkan yaitu: $Y = 68,328 - 8,99 d_1 - 10,06 d_2 + 2,185 d_3 + 9,441 d_4$ dapat digunakan untuk memprediksi.

Tahap pengujian individual dilakukan untuk melihat variabel bebas mana saja yang memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel bebas memiliki skala data ordinal sehingga analisis regresi *dummy* merupakan analisis yang relevan digunakan. Hasil pengujian individu dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Hasil Uji Individual

Prediktor	Koefisien	t _{hitung}	P-value	Keterangan
Konstan	68,328	26,83	0,000	Signifikan
d ₁	-8,995	-4,64	0,000	Signifikan
d ₂	-10,061	-6,28	0,000	Signifikan
d ₃	2,185	0,69	0,491	Tidak Signifikan
d ₄	9,441	3,57	0,000	Signifikan

Sumber : diolah penulis

Hasil pengujian individual diketahui bahwa seluruh variabel *dummy* signifikan, kecuali variabel *dummy* D₃. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat eselonisasi dan besaran anggaran yang dikelola mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran. Hasil uji ini senada dengan penelitian Darma (2017) yaitu bahwa tingkat eselonisasi mempengaruhi komitmen anggaran. Semakin tinggi tingkat eselonisasi semakin rendah penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III. Penyerapan anggaran merupakan salah satu wujud kinerja satuan kerja. Pencapaian atas target kinerja sangat membutuhkan perhatian dan arahan dari pimpinan mulai dari level tertinggi. Pimpinan satuan kerja yang bertindak sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) memiliki peran sentral dalam penyerapan anggaran satuan kerja. KPA dengan tingkat eselon tinggi akan memiliki pengawasan yang lebih rendah karena pengawasan dilakukan oleh pejabat level di bawahnya. Sementara itu, dengan tingkat eselonisasi lebih rendah seorang KPA akan lebih leluasa melakukan pengawasan karena rentang kendali yang tidak jauh.

Besaran anggaran dikategorikan menjadi anggaran kecil, sedang dan besar. Hasil pengujian individual menunjukkan bahwa besaran anggaran ini mempengaruhi signifikan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja. Anggaran yang besar yang direncanakan sebuah satuan kerja memiliki konsekuensi yang tidak mudah bagi satuan kerja. Zaenudinsyah (2016) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penumpukan pencairan dana pada akhir tahun adalah administrasi perbendaharaan. Administrasi perbendaharaan adalah hal yang mutlak dan memang harus dilengkapi oleh satuan kerja tiap akan melakukan pengesahan belanja negara. Proses administrasi ini melalui beberapa tahapan dan melibatkan beberapa pihak sehingga membutuhkan waktu. Jika proses ini terhambat di salah satu pihak, alur berikutnya akan terlambat dan

pada akhirnya akan menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran oleh KPPN. Penggantian uang persediaan yang terlambat dapat mengganggu operasionalisasi kantor. Hal ini senada dengan penelitian oleh Heriyanto (2012). Jika alur pencairan dana ini terlambat dan uang persediaan terlambat dilakukan *revolving*, bisa dipastikan bendahara tidak akan memiliki ketersediaan uang yang mencukupi. Kejadian ini berpotensi beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya.

Salah satu perbedaan antara analisis regresi linier biasa dengan analisis regresi linier *dummy* adalah terletak pada interpretasi persamaan regresi. Jika pada analisis regresi linier biasa, kenaikan pada variabel bebas akan diikuti oleh kenaikan atau penurunan variabel tak bebas sesuai dengan besarnya koefisien regresi yang bersesuaian. Namun, pada analisis regresi *dummy* ini, koefisien regresi menunjukkan perbedaan antara kategori dengan kategori pembanding. Persamaan regresi yang didapatkan adalah $Y = 68,328 - 8,99 d_1 - 10,06 d_2 + 2,185 d_3 + 9,441 d_4$. Variabel pembanding yang digunakan pada variabel tingkat eselonisasi adalah eselon III. Persentase realisasi anggaran sampai dengan triwulan III satuan kerja level eselon II lebih rendah sebesar 8,99% dibandingkan dengan satker level eselon III. Sementara itu, persentase realisasi anggaran satuan kerja level eselon I lebih rendah 10,1% jika dibandingkan dengan satuan kerja level eselon III.

Besaran anggaran yang dikelola mempengaruhi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III. Pembanding yang digunakan pada variabel ini adalah kategori anggaran kecil. Hasil Uji Individual menunjukkan D₃ tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa persentase realisasi anggaran s.d triwulan III satker pagu kecil tidak berbeda dengan persentase realisasi anggaran s.d triwulan III pagu sedang. Satker pagu besar memiliki persentase realisasi anggaran s.d Triwulan III lebih tinggi sebesar 9,44% dibandingkan

dengan satuan kerja dipa kecil. Satuan kerja dengan PAGU yang lebih besar memiliki beban yang lebih besar untuk mencapai target penyerapan anggaran. Satuan kerja dengan PAGU besar akan cenderung untuk mendorong penyerapan anggaran lebih cepat karena adanya kekhawatiran tidak akan bisa mengoptimalkan penyerapan anggaran. Penyebab lain adalah satuan kerja dengan PAGU kecil biasanya memiliki porsi belanja modal lebih kecil dibanding kegiatan rutin dan belanja modal dengan porsi kecil ini biasanya dapat dieksekusi tanpa melalui proses lelang. Satuan kerja PAGU besar biasanya memiliki porsi belanja modal yang besar. Satuan-satuan kerja dengan belanja modal dituntut untuk lebih cepat dalam merealisasikan belanja karena tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang tidak singkat.

Koefisien determinasi yang didapatkan pada analisis ini adalah sebesar 34,9% artinya bahwa variabel tingkat eselonisasi dan besaran anggaran yang dikelola mampu menjelaskan variasi variabel kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 34,9%. Sebesar 65,1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

- a. Kualitas penyerapan anggaran satuan kerja Kementerian Keuangan lingkup wilayah pembayaran KPPN ABC di Jakarta sudah baik. Satuan kerja tidak menumpuk penyerapan anggaran pada akhir tahun.
- b. Tingkat eselonisasi dan besaran anggaran mempengaruhi kualitas penyerapan anggaran satuan kerja. Semakin tinggi tingkat eselonisasi, semakin rendah persentase realisasi anggaran sampai dengan triwulan III. Persentase realisasi anggaran sampai dengan triwulan III satuan kerja level eselon II lebih rendah sebesar 8,99% dibandingkan dengan satker level eselon III. Sementara itu, persentase realisasi anggaran satuan kerja level eselon I lebih rendah 10,1% jika dibandingkan dengan satuan kerja level eselon III.
- c. Semakin besar anggaran akan mendorong satuan kerja untuk merealisasikan anggaran lebih cepat. Persentase realisasi anggaran s.d triwulan III satker pagu kecil tidak berbeda dengan persentase realisasi anggaran s.d triwulan III pagu sedang. Satker pagu besar memiliki persentase realisasi anggaran s.d Triwulan III lebih tinggi sebesar 9,44% dibandingkan dengan satuan kerja DIPA kecil.

5.2. Saran

- a. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyediakan aplikasi OMSPAN untuk memudahkan pengawasan oleh pihak yang berwenang. Pimpinan satuan kerja selaku KPA dapat dengan mudah melakukan pemantauan. Namun, jika fasilitas ini tidak didukung dengan adanya

komunikasi antara pimpinan dan bawahan, upaya ini akan menjadi kurang optimal.

- b. Satuan kerja harus senantiasa mengoptimalkan penyerapan anggaran sedini mungkin, baik DIPA kecil, sedang maupun besar. Meskipun beban satuan kerja dengan anggaran lebih kecil dibandingkan dengan DIPA besar. Namun, alangkah baiknya jika semua satuan kerja tidak menunda-nunda pelaksanaan kegiatan dan segera menuntaskan pertanggungjawaban sehingga akan menghasilkan penyerapan anggaran satuan kerja yang baik.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan penulis kepada PKN STAN yang telah memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian. Selain itu, terima kasih juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas *support* data yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Alfayuni, F and Dahtiah, N. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran dan belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cirebon). *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop Dan National Seminar*.
- Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1(4), 202–212.
- Darma, R. (2017). *Pengaruh Faktor Demografi Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Komitmen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Herriyanto, H. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Universitas Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2017a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2017 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara*. Kementerian Keuangan.

- Kementerian Keuangan. (2017b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2017 tentang rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana dan perencanaan kas*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Perdagangan. (2021). *Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Sebagai Alat Kontrol Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Kinerja Keuangan Satuan Kerja*. <https://ditjenpkn.kemendag.go.id/pojok-media/indikator-kinerja-pelaksana-anggaran-ikpa-sebagai-alat-kontrol-dalam-melakukan-pengawasan-pengelolaan-kinerja-keuangan-satuan-kerja>.
- Kementerian Keuangan. (2013). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013-Audited*. Kementerian Keuangan.
- Miliasih, R. (2012). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Universitas Indonesia.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Salemba Empat.
- Nugroho, M. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun (Studi Kasus di KPPN Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Prabowo, C. E. (2018). SPENDING REVIEW 2018: MENINGKATKAN VALUE FOR MONEY BELANJA PEMERINTAH. In *Indonesian Treasury Update Volume 3 Nomor 2*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Robert, A. (2009). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat.
- Rusqiyati. (2014). *Realisasi Penyerapan Anggaran Pemprov 2013 di Bawah Target*. Metrotvnews.
- Simorangkir, I. (2020). *Tinjauan Efektifitas Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Pusat Di Wilayah Pembayaran KPPN ABC*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 129–138. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15332>
- Syukriy, A. (2012). *Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Gajah Mada.
- Ulfa, S. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja pada Akhir Tahun Anggaran di SKPD Pemerintah Kota Binjai dengan Pengendalian Internal sebagai Moderasi*. Universitas Sumatera Utara.
- Walpole, R. (1995). *Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan* (4 (ed.)). Institut Teknologi Bandung.
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 67–83. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56>